

LAPORAN PENELITIAN



**DIMENSI DESA TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN DANA DESA (STUDI PADA DESA DI INDONESIA)**

Oleh :

Dr. Endah Sri Wahyuni, M.Si, Ak, CA

090073

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
GASAL 2020/2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Dimensi Desa Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Indonesia)

Pelaksana
Nama Lengkap : Dr. Endah Sri Wahyuni, M.Si, Ak, CA
NIP/NIDN : 090073 / 0312086901
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
No HP : 0812-9329-593
Alamat email : endah.swahyuni@budiluhur.ac.id

Jakarta, 19 Februari 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Amir Indrabudiman, S.E., M.M
NIP 000047

Pelaksana Kegiatan

Dr. Endah Sri Wahyuni, M.Si, Ak, CA
NIP 090073

**DIMENSI DESA TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DANA DESA
(Studi Pada Desa Di Indonesia)**

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi desa tentang etika penyusunan laporan keuangan yang sangat relevan. Objek penelitian ialah Ketua BUMDes, Kepala Desa dan Bendahara Desa di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik *purposive sampling* dengan pengumpulan data. Data didapat dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 200 perangkat desa, di Indonesia. Dari 92 responden (50%) yang terdiri dari 48 orang dari ketua BUMDes, 33 orang dari kepala desa dan 11 orang bendahara desa yang telah memberikan jawaban. Analisis data menggunakan ANOVA dengan program SPSS versi 25.

Hasil yang didapat melalui pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara ketua BUMDes dengan kepala desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci: Etika Penyusunan Laporan Keuangan, Dana Desa, Dimensi Desa

1. PENDAHULUAN

Terdapat beragam masalah yang membuat ribuan BUMDes belum tumbuh sebagaimana harapan. Pertama, karena wacana BUMDes bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya, dan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan bahwa jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh Indonesia pada bulan Juli 2018 (Sorotdesa, 2020). Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes. Permasalahan yang dihadapi yaitu sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas peluang usaha rumahan yang menghasilkan. Sebagian lagi, justru layu sebelum berkembang karena masih 'sedikitnya' pemahaman BUMDes pada sebagian besar kepala desa.

Kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Sedarmayanti, 2013). Kompetensi sumber daya manusia diperlukan karena anggaran pengelolaan BUMDes berasal dari dana desa yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat. Jumlah dana desa yang besar dan setiap akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada direktur dan kepala desa secara transparan dan akuntabel.

Pengguna laporan keuangan dana desa mengharapkan untuk memperoleh semua informasi yang mereka butuhkan dari laporan keuangan, sementara informasi tersebut belum tentu tersedia. Pemerintah Desa harus membayar biaya (*cost*) yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyediakan suatu informasi dalam laporan keuangan, sehingga terdapat jumlah informasi yang diungkapkan pemerintah desa menjadi terbatas (Indira, 2018). Penyusunan laporan keuangan dana desa tersaji secara alami, tidak ada unsur *fraud*, *earning management*, *error* dan lainnya. Tersaji sesuai standar yang diatur dalam laporan keuangan dana desa. Penyusunan PSAK merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi desa sehingga desa mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar keuangan yang berlaku umum di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 2018).

Dipenghujung tahun 2015 BPKP mengeluarkan sebuah sistem yang diberi label SIMDA Desa yang berguna sebagai standar pelaporan APBDes. Dalam perjalanannya, SIMDA Desa berubah nama menjadi Siskeudes dan perlahan-lahan mulai disosialisasikan ke desadesa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) saat ini telah menemukan bentuknya yang pasti. Siskeudes sampai saat ini telah diterapkan oleh desa-desa yang ada di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan responden dari ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *behavioral* (perilaku dan persepsi). Kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan model yang digunakan oleh Klikeman dan Henning (2000).

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Laporan Keuangan

Apabila mengkaji sejarah, ilmu yang berhubungan dengan proses pencatatan dalam dunia bisnis sudah dimulai sejak zaman Babilonia pada usaha perdagangan yang mereka lakukan.

Akan tetapi sistem pembukuannya muncul dari praktik-praktik yang ada di Venesia. Sehingga dalam bukunya *Luca Pacioli* menyebutkan metode ini sebagai *Metode Venesia* (Irawan, 2006).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu hasil akhir dari siklus akuntansi yang berupa informasi keuangan perusahaan yang menggambarkan keadaan perusahaan yang digunakan sebagai bentuk *responsibility* (pertanggungjawaban) manajemen atas kinerjanya selama ini. Pertanggungjawaban pengelolaan dana abadi berdasarkan Undang-Undang Desa tentang dana desa menganjurkan desa membuat laporan keuangan.

Etika

Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Disamping itu, profesi akuntansi mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan publik, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah (Hidayah, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan terhadap ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa karena mereka adalah penyusun laporan keuangan berdasar PSAK dan menerapkan etika dalam pelaporan dana desa.

PSAK Akuntansi Dana Desa

Penyusunan pedoman akuntansi Desa merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi dana desa sehingga dana desa mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah memberi panduan akuntansi yang tidak mengikat bagi desa dalam penyusunan laporan keuangan. (PSAK, 2018). Pedoman ini diterapkan oleh unit usaha yang dimiliki desa yang berbadan hukum serta terdaftar di Kementerian Desa.

Tujuan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah desa adalah: (a) memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi; dan (b) bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan dana desa atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya (PSAK, 2018). Pengurus dana desa bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap dari dana desa terdiri atas:

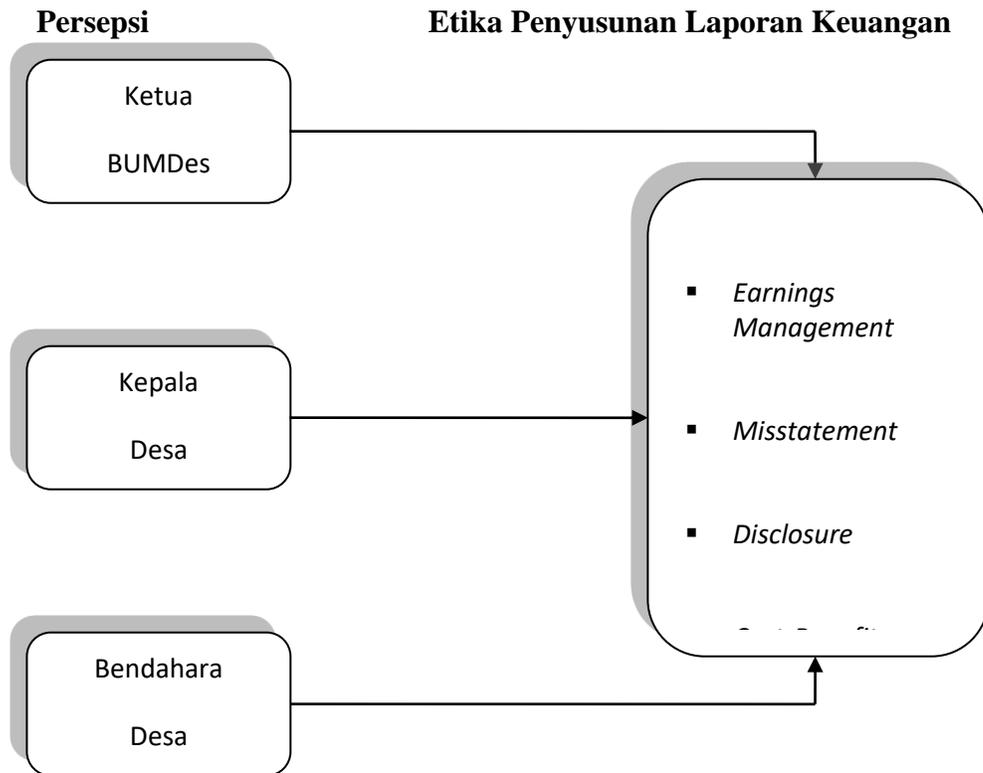
- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan aktivitas;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dana desa disusun dalam bahasa Indonesia. Mata uang fungsional dan pelaporan dari laporan keuangan dana desa adalah rupiah (PSAK, 2018).

Kerangka Pemikiran

Penyusunan pedoman akuntansi desa merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi desa sehingga desa mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah memberi panduan akuntansi yang tidak mengikat bagi desa dalam penyusunan laporan keuangan. (PSAK, 2018). Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara (Lincoln Arsyad, 1999). Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis yang lain yang lebih tepat. Hal ini memungkinkan karena hipotesis yang diperoleh biasanya tergantung pada masalah-masalah yang di teliti dan konsep-konsep yang digunakan.

Penelitian ini merupakan penelitian awal yang merujuk pada Permasalahan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Penelitian dilakukan karena peneliti melihat adanya potensi kerawan transparansi dan akuntabilitas pada pertanggungjawaban dana desa dari Undang-Undang Desa. Penelitian ini menggunakan instrumen yang sama dengan Fitriany dan Yulianti (2005) yaitu instrumen yang di adopsi dari Klikeman dan Henning (2000). Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda yaitu ketua BUMDes, kepala desa, serta bendahara desa selaku penyusun laporan keuangan dana desa. Berdasarkan uraian diatas dan pada penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa

BUMDes merupakan lembaga desa, yang mana ketua BUMDes menjadi figur sentral, sebagai pusat kegiatan roda ekonomi, dan pengembangan potensi desa di bawah bimbingan kepala desa. Dana desa dapat juga diartikan sebagai penggerak ekonomi desa. Penyusunan laporan keuangan dana desa idealnya tersaji secara alami, tidak ada unsur *earning management*,

dan lainnya. Tersaji sesuai standar yang diatur dalam laporan keuangan dana desa. Penyusunan Pedoman akuntansi desa merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi sehingga desa mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar keuangan yang berlaku umum di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 2018).

Berdasarkan uraian tersebut serta pada penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis tambahan sebagai berikut :

H2 : Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan kepala desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa

H3 : Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa

H4 : Terdapat perbedaan persepsi antara kepala desa dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan dana desa

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ilmu Akuntansi, pendekatan empiris dan pendekatan komparatif dengan berpegang pada penelitian kualitatif deskriptif. Metode Pendekatan dengan ilmu Akuntansi merupakan cara atau prosedur dan metodologi yang dipergunakan untuk mengetahui Persepsi Ketua BUMDes, Kepala Desa dan Bendahara Desa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Berbasis PSAK.

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa yang berada pada desa-desa di Indonesia. Desa-desa yang diteliti ialah desa yang memiliki unit usaha (koperasi, dan lainnya) serta pernah atau rutin mendapat bantuan dana pemerintah baik daerah maupun pusat. Penarikan sampel dalam penelitian ini diambil dengan dua metode sampling. Pengambilan sampel untuk kelompok ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa dilakukan dengan *purposive sampling*.

Variabel Penelitian

Variabel dan definisi operasional dari penelitian ini adalah persepsi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Indikator etika penyusunan laporan keuangan diwakilkan pada persepsi responden terhadap:

- a) Manajemen laba (*earnings management*)
- b) Salah saji pelaporan (*mistate*)
- c) Pengungkapan (*disclosure*)
- d) Biaya dan manfaat (*cost and benefit*)
- e) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Instrumen ini dikembangkan Klikeman dan Henning (2000), diukur dengan “skala Likert (7 point)”. Menjelaskan, “angka 1 (satu) mengindikasikan sangat tidak setuju, sedangkan angka 7 (tujuh) mengindikasikan sangat setuju sekali”.

Teknis Analisis

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 44 responden menunjukkan bahwa hasil instrumen penelitian yang digunakan adalah

valid, dimana nilai korelasinya lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2017) dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0.6 (Sekaran 2018).

Uji Hipotesis

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan antar kelompok responden, oleh karena itu pengujian hipotesis yang digunakan adalah *Analysis of Variance* (ANOVA) dengan tingkat signifikansi (α) 5%. ANOVA merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama (*main effect*) dari variabel independen kategorikal terhadap variabel metrik. Pengaruh utama adalah pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan
- H2 : Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan kepala desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan
- H3 : Terdapat perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan
- H4 : Terdapat perbedaan persepsi antara kepala desa dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan

Analisis terhadap hasil ANOVA dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

a. *Test of Between Subject Effects*

Hasil ANOVA akan menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen melalui tabel *Test of Between Subject Effects*. Ada tidaknya pengaruh utama (*main effects*) variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi variabel independen. Hipotesis yang diuji:

- H01 : Tidak terdapat perbedaan persepsi ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa tidak mempengaruhi etika penyusunan laporan keuangan.
- H1 : Terdapat perbedaan persepsi ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa mempengaruhi etika penyusunan laporan keuangan.

Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Signifikan bila nilai sig. < 0,05, artinya terdapat perbedaan persepsi antara ketiga kelompok tersebut (H1 diterima).
- 2) Tidak signifikan bila nilai sig > 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara ketiga kelompok tersebut (H1 ditolak).

b. *Pos Hoc Test*

Untuk mengetahui besarnya perbedaan persepsi antar kelompok dalam variabel maka digunakan *Pos Hoc test* berupa *Turkey Test* dan *Bonferoni Test*.

Perbedaan rata-rata persepsi antara kelompok akuntan pendidik, akuntan publik, dan mahasiswa akuntansi dapat dilihat pada tabel *multiple comparison* di kolom *mean difference*. Selanjutnya untuk mengetahui apakah perbedaan nilai dalam tiap kelompok signifikan atau tidak, dapat dilihat pada kolom *nilai sig*. Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Jika tingkat signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok.

- 2) Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan valid atau tidaknya sebuah butir dalam kuesioner dilakukan dengan menggunakan r hitung. Jika nilai r hitung $> r$ tabel maka butir soal tersebut valid, sedangkan jika r hitung $< r$ tabel dikatakan bahwa butir soal yang digunakan adalah tidak valid.

Hasil uji validitas kuesioner semua kelompok dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel di bawah.

Hasil Uji Validitas Semua Kelompok

Indikator	Item	R hitung	Keterangan
<i>Earning Management</i>	EM	0,375	Valid
<i>Mistate</i>	M1	0,416	Valid
	M2	0,521	Valid
	M3	0,435	Valid
	M4	0,535	Valid
<i>Disclosure</i>	D1	0,475	Valid
	D2	0,353	Valid
	D3	0,445	Valid
<i>Cost-Benefit</i>	CB1	0,634	Valid
	CB2	0,616	Valid
	CB3	0,521	Valid
<i>Responsibility</i>	R1	0,375	Valid
	R2	0,433	Valid

Sumber: Data primer diolah,

Nilai R Tabel untuk jumlah N sebanyak 185 pada taraf signifikansi sebesar 5% adalah 0,141. Pada tabel 4.10 tersebut tampak bahwa nilai r hitung untuk semua indikator pada responden penelitian adalah di atas r tabel (0,141). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua indikator yang dipergunakan adalah valid atau mampu mengukur apa yang akan diukur.

Uji reliabilitas dipergunakan untuk menunjukkan kestabilan dan kekonsistenan instrumen dalam mengukur konsep yang sama jika dilakukan pengukuran kembali dari waktu ke waktu. Pengukuran yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan *one shot study* yang menggunakan uji Statistik *Cronbach Alpha*. Suatu rangkaian pertanyaan dikatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien *Cronbach Alpha* di atas 0,6. Berikut adalah uji reliabilitas:

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>	<i>N of Items</i>
.726	.719	13

Disini menunjukkan nilai reliabilitas semua kelompok sebesar 0,719. Tampak bahwa semua nilai koefisien *Cronbach Alpha* adalah di atas 0,6 sehingga diinterpretasikan bahwa rangkaian kuesioner yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Analisis of Variance (ANOVA)

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan ANOVA. Berikut adalah ANOVA pada penelitian ini:

ANOVA

	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Between Groups</i>	730.335	2	365.167	4.940	.008
<i>Within Groups</i>	13453.806	182	73.922		
<i>Total</i>	14184.141	184			

Diatas memberikan nilai F hitung sebesar 4,940 dengan signifikansi sebesar 0,08. Nilai signifikansi di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan pada ketiga kelompok penelitian.

Untuk melihat secara detail perbedaan pada masing-masing kelompok, dilakukan uji *Post Hoc* yang ditunjukkan pada tabel *Post Hoc*. Tabel *Post Hoc* tersebut menunjukkan bahwa signifikansi antara kelompok kepala desa dengan kelompok bendahara desa adalah sebesar 0,017 pada Tukey HSD dan sebesar 0,018 pada Benferroni. Nilai tersebut berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok ketua BUMDes dengan kelompok kepala desa.

Tabel Post Hoc

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Total

(I) KODE	(J) KODE			
		<i>Mean Difference (I-J)</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Sig.</i>

<i>Tukey HSD</i>	1	2	3.966*	1.429	.017
		3	-.214	1.704	.991
	2	1	-3.966*	1.429	.017
		3	-4.180*	1.683	.037
	3	1	.214	1.704	.991
		2	4.180*	1.683	.037
<i>Bonferroni</i>	1	2	3.966*	1.429	.018
		3	-.214	1.704	1.000
	2	1	-3.966*	1.429	.018
		3	-4.180*	1.683	.042
	3	1	.214	1.704	1.000
		2	4.180*	1.683	.042
<i>Tamhane</i>	1	2	3.966*	1.347	.011
		3	-.214	1.875	.999
	2	1	-3.966*	1.347	.011
		3	-4.180	1.868	.083
	3	1	.214	1.875	.999
		2	4.180	1.868	.083

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Lebih lanjut signifikansi antara kelompok kepala desa dengan bendahara desa adalah sebesar 0,037 (*Tukey HSD*) dan sebesar 0,042 (*Benferroni*). Nilai tersebut berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kepala desa dengan kelompok bendahara desa.

Rincian yang ketiga adalah antara kelompok ketua BUMDes dengan kelompok kepala desa dengan signifikansi sebesar 0,991 (*Tukey HSD*) dan sebesar 1,000 (*Benferroni*). Keduanya

berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok ketua BUMDes dengan kelompok kepala desa.

Perbedaan Persepsi Ketua BUMDes, Kepala Desa, dan Bendahara Desa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan pada ketiga sampel penelitian yaitu sampel ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara. Hasil tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 4,940 dengan signifikansi sebesar 0,008 ($< 0,05$). Berarti secara umum, etika penyusunan laporan keuangan dipersepsikan secara berbeda oleh masing-masing kelompok. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing kelompok sehingga mempunyai persepsi yang berbeda tentang etika dalam penyusunan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman mampu memberikan tingkat pemahaman yang lebih kepada seorang akuntan. Dengan demikian, seorang akuntan yang telah mempunyai tingkat pendidikan yang cukup, dan juga mempunyai pengalaman yang relatif banyak dapat dikatakan memiliki persepsi etis yang lebih baik terhadap penyusunan laporan keuangan.

Perbedaan Persepsi Ketua BUMDes dan Kepala Desa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan

Tinjauan secara rinci menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan antar kelompok ketua BUMDes dengan kelompok kepala desa. Hasil ini ditunjukkan dengan uji *Post Hoc* dengan signifikansi sebesar 0,017 (*Tukey HSD*) dan sebesar 0,018 (*Benferroni*) yang keduanya di bawah 0,05.

Perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan ketua BUMDes dengan kepala desa dimungkinkan karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan pengalaman. Ketua BUMDes sebagai *novice* mempunyai pengalaman yang jauh lebih rendah dari pada kepala desa. Demikian juga dalam hal kepemimpinan, ketua BUMDes masih minim pengalaman dibandingkan dengan kepala desa.

Perbedaan Persepsi Ketua BUMDes dan Bendahara terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan

Perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan yang signifikan juga ditemukan antara Ketua BUMDes dengan Bendahara Desa. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji *Post Hoc* sebesar 0,037 (*Tukey HSD*) dan sebesar 0,042 (*Benferroni*) yang keduanya di bawah 0,05.

Pertimbangan serupa juga diberikan kepada perbedaan ini yaitu dikarenakan adanya perbedaan tingkat pendidikan dan tingkat pengalaman yang relatif jauh berbeda. Bendahara desa minimal telah menempuh pendidikan sampai dengan D3/S1 ditambah dengan pengalaman mengelola anggaran desa. Selain itu, ketua BUMDes relatif minim pengalaman dalam menyusun laporan keuangan.

Perbedaan Persepsi Kepala Desa dan Bendahara Desa terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan

Penelitian ini tidak menemukan adanya perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan antara kepala desa dengan bendahara desa. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji *Post Hoc* sebesar 0,991 (*Tukey HSD*) dan sebesar 1,000 (*Benferroni*) yang keduanya di atas 0,05.

Tidak adanya perbedaan ini dimungkinkan karena adanya kesamaan karakteristik antara kepala desa dengan bendahara desa. Kedua kelompok ini relatif mempunyai tingkat pendidikan dan pengalaman yang relatif sama.

Tingkat pengalaman mengelola anggaran, bendahara desa mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan kepala desa. Akan tetapi, dalam hal kepemimpinan desa relatif lebih banyak kepala desa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang persepsi ketua BUMDes, kepala desa, dan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antara ketua BUMDes dengan kepala desa, ketua BUMDes dengan bendahara desa. Namun tidak ada perbedaan persepsi antara kepala desa dengan bendahara desa terhadap etika penyusunan laporan keuangan.

Kesimpulan ini didukung hasil analisis data berikut ini:

1. Terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan yang signifikan antara kelompok ketua BUMDes, kepala desa dan bendahara desa. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 4,940 dengan signifikansi sebesar 0,008 ($< 0,05$).
2. Terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan yang signifikan antara ketua BUMDes dengan kepala desa. Hasil ini ditunjukkan dengan signifikansi pada uji *Post Hoc* sebesar 0,017 (*Tukey HSD*) dan sebesar 0,018 (*Benferroni*) yang keduanya di bawah 0,05.
3. Terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan yang signifikan antara ketua BUMDes dengan bendahara desa. Hasil ini ditunjukkan dengan signifikansi pada uji *Post Hoc* sebesar 0,037 (*Tukey HSD*) dan sebesar 0,042 (*Benferroni*) yang keduanya di bawah 0,05.
4. Tidak terdapat perbedaan persepsi etika penyusunan laporan keuangan yang signifikan antara kepala desa dengan bendahara desa. Hasil ini ditunjukkan dengan signifikansi pada uji *Post Hoc* sebesar 0,991 (*Tukey HSD*) dan sebesar 1,000 (*Benferroni*) yang keduanya di atas 0,05.

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman mampu memberikan tingkat pemahaman yang lebih kepada seorang akuntan. Dengan demikian, seorang akuntan yang telah mempunyai tingkat pendidikan yang cukup, dan juga mempunyai pengalaman yang relatif banyak dapat dikatakan memiliki persepsi etis yang lebih baik terhadap penyusunan laporan keuangan.

6. REFERENSI PUSTAKA

- Astri, Arfani NK, dan Noer Sasongko. 2005. "Analisis Perbedaan Pengaturan Laba (*earning management*) pada Kondisi Laba dan Rugi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (April), Vol. 4, No. 1.
- Arindini, Ari, Andini. 2017. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan (Survei Pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam). IAIN Surakarta.
- Bank Indonesia. 2018. "Pedoman Akuntansi Pesantren". Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah.
- Bay, D.B. & R.R. Greenberg, "The Relationship of the DIT and Behavior : A Replication". *Issues in Accounting Education*, vol 16 (2001), pp 367-380.
- Clikeman, P.M. & S. L. Henning, "The Socialization of undergraduate accounting students". *Issues in Accounting Education*, vol 15 (2000), pp 1-15.
- Fitriani, Bayu Hardianthi. 2010. "Persepsi Dosen dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan". Universitas Pembangunan Nasional "Veteran": Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. SPSS.*
- Goa. J.C. & L. Thorne, "An Introduction to the special issue on professionalism and ethics in Accounting Education'. *Issues in Accounting Education*, vol 19 (2004), pp 1-6.
- Healy, P., & J.M. Wahlen. "A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting". *Accounting Horizon*, vol 13 (1999), pp. 365 - 383.
- Harahap. 2001. Kritik Terhadap PSAK Perbankan Syari'ah, *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol 1, No. 3.
- Herawaty, Arleen, dan Yulius Kurnia Susanto. 2009. "Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Mei), Vol. 11, No. 1.
- Hidayat, Imam. P. 2002, Kumpulan Artikel Akuntansi Syari'ah [Online]. Didapatkan: [file:///E:/kumpulan artikel akuntansi syari'ah/tujuan-laporan- keuangan-akuntansi.html](file:///E:/kumpulan%20artikel%20akuntansi%20syari'ah/tujuan-laporan-keuangan-akuntansi.html). [8 Oktober 2012].
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101: Akuntansi Perbankan Syari'ah. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2018. "PSAK 112 Akuntansi Wakaf" Jakarta: Geraha Akuntan
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1998. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. UGM.

- Jeffrey, C., "Ethical Development of Accounting Students, Non Accounting Business Students and Liberal Arts Students". *Issues in Accounting Education*, vol 6 (1993), pp 86 -96.
- Kiger. C. E., "Making Ethics a pervasive component of Accounting Education'. *Management Accounting Quarterly*, vol 5 (2004), pp 42-54.
- Marriott, P & Neil Marriott, "Are we turning them on? A Longitudinal study of undergraduate accounting students' attitudes towards accounting as a profession".
- Murtanto dan Marini. 2003. "Persepsi Akuntan Pria dan Akuntan Wanita serta Mahasiswa dan Mahasiswi terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI*. Surabaya: 16-17 Oktober.
- Mc Carthy, I N., " Professional Ethics Code Conflict Situations : Ethical and Value Orientation of Collegiate Accounting Students". *Journal of Business Ethics*, vol 16 (1997), pp 1467 – 1473.
- Nurainiyah, Faiqatun. 2019. "*penyusunan etika, tingkat religius, dan persepsi peran penyusun laporan keuangan pondok pesantren terhadap kualitas laporan keuangan pondok pesantren di kota semarang*". Skripsi, UIN Walisongo. Semarang.
- Nurlan, Andi Besse. 2011. "Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia". Skripsi. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2019. "Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pondok Pesantren" Jakarta .
- Radtke, R.R., "The Effects of Gender and Setting on Accountants' Ethically Sensitive Decisions". *Journal of Business Ethics*, 2000, pp 299-312.
- Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Scott, William R. (2003), "*Financial Accounting Theory 3 Ed.*", Prentice-Hall.
- Setyaningrum, Anis. 2018. "*Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)*". Surakarta.
- Smyth, M.L & J.R. Davis, "Perceptions of Dishonesty Among Two-Year College Students : Academic versus Business Situations". *Journal of Business Ethics*, vol 51 (2004), pp 63
- Triyuwono, Iwan, dan Moh As'udi. 2001. *Akuntansi Syari'ah: Memformulasikan Konsep Laba dalam konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. *Journal of Islamic Economics* Vol. 4, No. 1.

Wyatt, A.R., "Accounting Professionalism - They just don't get it?". *Accounting Horizons*, vol 18 (2004), pp 45-53.

Yulianti dan Fitriany. 2005. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan". *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII*.